

**ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN USAHA KOPRA
TERHADAP KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL)
DI DESA POLEWALI KECAMATAN BAMBALAMOTU
KABUPATEN MAMUJU UTARA PROVINSI SULAWESI BARAT**

**Analysis of Contribution Revenues Copra to The Needs of Life Worth (KHL) at The
Village of Polewali Regency North Mamuju, Bambalamotu Subdistrict of West Sulawesi**

Ahmad Mukhlisin¹⁾, Saharia Kassa²⁾, Rukavina Baksh²⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Agribisnis. Fakultas Pertanian. Universitas Tadulako. Palu

²⁾ Dosen Program studi Agribisnis. Fakultas Pertanian. Universitas Tadulako. Palu

e-mail: ahmadmukhlisin.ellis@gmail.com. e-mail: saharia_kassa@yahoo.com. e-mail: myvina00@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to know the magnitude of the average income of the copra entrepreneur's and the magnitude of the income contribution of the copra entrepreneur to the KHL. This research was carried out in the village of Polewali, Bambalamotu subdistrict, Regency of North Mamuju, West Sulawesi province in December 2015. The respondent's determination is done by a simple random sampling method, determining in the number of samples is done using the formula of slovin, respondents were taken in this research as much as 31 KK of 74 KK population numbers. This research is carried out by surveys, data collected in the form of primary and secondary data. The results of the analysis showed that the income earned of copra entrepreneur in the village of Polewali is Rp. 10.561.780/four months and it is when averaged is Rp. 2.640.445/month. The results of the analysis of contribution rate of necessities of worthy life (MOE) showed that the necessities of worthy life which have met the criteria based on Sinukaban is of 1.04 percent, the WORLD BANK'S US \$ 1 is 1,58%, and BPS is 1.05% whereas based on the criteria of the WORLD BANK'S US \$ 2 is 0.79%, and on the basis of 0.33% KHI and UMP West Sulawesi province is 0.37% so the revenue contribution by employers in the village of Polewali copra is not fully met the criteria of the necessities of worthy life of 1%.

Key Words : Copra, income, worth living needs.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan rata-rata pengusaha kopra dan besarnya kontribusi pendapatan pengusaha kopra terhadap KHL. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat pada Bulan Desember 2015. Penentuan responden dilakukan dengan metode *simple random sampling*, penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus slovin, responden yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 31 KK dari jumlah populasi 74 KK. Penelitian ini dilakukan dengan cara survei, data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh pengusaha kopra di Desa Polewali adalah Rp. 10.561.780/empat bulan apabila di rata-ratakan menjadi Rp. 2.640.445/bulan. Hasil dari analisis kontribusi tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menunjukkan bahwa Kebutuhan Hidup Layak yang telah memenuhi kriteria yaitu berdasarkan Sinukaban sebesar 1,04%, BANK DUNIA US\$ 1 sebesar 1,58%, dan BPS sebesar 1,05% sedangkan berdasarkan kriteria BANK DUNIA US\$ 2 sebesar 0,79%, dan berdasarkan KHI sebesar 0,33% serta UMP Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,37% jadi dengan kontribusi pendapatan tersebut pengusaha kopra di Desa Polewali belum sepenuhnya memenuhi kriteria kebutuhan hidup layak sebesar 1%.

Kata Kunci : Kebutuhan hidup layak, kopra, pendapatan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang kehidupan perekonominya tidak dapat terlepas dari sektor pertanian, terutama sebagai penyedia bahan pangan bagi seluruh masyarakat serta menopang pertumbuhan industri dalam hal penyediaan bahan baku industri. Sub sektor perkebunan sebagai bagian dari sektor pertanian yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Secara umum tanaman perkebunan mempunyai peranan yang besar, terutama dalam penyediaan lapangan kerja. Sub sektor perkebunan mampu menyerap 17,1 juta tenaga kerja atau 1,03% dari angkatan kerja. Selain itu rata-rata ekspor per tahun mencapai sekitar US \$ 3,9 milyar atau 47,44% dari total ekspor hasil pertanian. (Statistik Indonesia BPS., 2009).

Komoditi perkebunan merupakan salah satu komoditi pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpeluang untuk dikembangkan dalam rangka memperbesar pendapatan negara dan meningkatkan pendapatan petani. Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas yang berdampak kepada peningkatan pendapatan petani, adalah dengan pengelolaan input usahatani seperti tenaga kerja, luas lahan dan keikutsertaan dalam kelompok tani secara optimal dan efektif. Usahatani yang berbasis organisasi dan kelompok dalam bentuk komunitas yang aktif dan mandiri akan meningkatkan posisi tawar menawar petani (*bargaining position*). Petani makin kuat dalam menentukan harga produk berupa kelapa butiran maupun kopra (Luntungan *et al.*, 2005).

Sulawesi Barat memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, baik berupa sumberdaya hasil hutan, hasil laut, perkebunan dan pertanian. Apabila potensi ini dikelola dengan baik akan menjadi modal dalam pembangunan daerah dan nasional, karena perannya sebagai penyedia lapangan kerja yang diharapkan dapat berperan mengatasi kemiskinan guna meningkatkan kebutuhan

hidup layak di Daerah Sulawesi Barat khususnya Desa Polewali.

Apabila dilihat dari segi pendapatan pengusaha kopra pada umumnya memiliki penghasilan yang mencukupi, akan tetapi seiring dengan fluktuasinya harga kopra menjadikan pengusaha kopra memilih usaha lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.

Wardani., (2012) mengemukakan bahwa upah merupakan sumber utama penghasilan seorang pekerja, sehingga upah harus cukup memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Batas kewajaran tersebut dalam Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum (KHM) atau seringkali saat ini disebut dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Kemiskinan juga merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradapan, sehingga semua orang sepakat bahwa kemiskinan harus ditanggulangi. Strategi penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat, supaya kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi tepat sasaran. (Yacoub, 2012).

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah yang masih mengalami permasalahan dan proplema dalam menangani pengentasan kemiskinan, sedang Kebutuhan Hidup Layak semakin meningkat. Tahun 2015 tingkat Kebutuhan Hidup Layak Provinsi Sulawesi Barat mencapai Rp. 1.981.507 diperkirakan meningkat sebesar Rp. 38.981 dibanding tahun sebelumnya (2014) sebesar Rp. 1.919.487. Perbandingan antara Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Provinsi tidak sebanding dengan harapan masyarakat. Tahun 2015 penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Barat meningkat di Tahun 2014 Rp. 1.400.000 menjadi

Rp. 1.655.000 (2015). Besarnya Upah Minimum Provinsi belum dapat menjamin akan terpenuhinya kebutuhan hidup layak pengusaha kopra yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Kabupaten Mamuju Utara Kecamatan Bambalamotu Desa Polewali merupakan studi kasus dalam penelitian ini. Hal ini yang melatar belakangi perlu adanya evaluasi mengenai kontribusi pendapatan terhadap kebutuhan hidup layak di Desa Polewali. Secara rinci pendapatan masyarakat di Kecamatan Bambalamotu berasal dari hasil usaha kopra, salah satu desa penghasil kopra di Kecamatan Bambalamotu adalah Desa Polewali. Mengingat sampai saat ini pendapatan pengusaha kopra di Desa Polewali belum diketahui dengan pasti karena belum adanya penelitian tentang hal tersebut, terutama jika dikaitkan dengan tingkat kebutuhan hidup layak. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui berapa besar pendapatan rata rata petani kopra per musim panen di Desa Polewali, kemudian berapa besar kontribusi pendapatan usaha kopra di Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara terhadap tingkat Kebutuhan Hidup Layak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan “studi kasus” pada pengusaha kopra di Desa Polewali. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*Purposive*) dengan pertimbangan bahwa Desa Polewali adalah daerah produksi kopra di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Desember 2015.

Penentuan responden dilakukan dengan metode *Simpel Random Sampling*, dengan diambil sebanyak 31 orang dari jumlah populasi 74 orang pengusaha kopra Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara Jumlah tersebut dianggap mewakili responden yang mengusahakan kopra.

Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara secara langsung

kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (*questionnaire*). Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, literatur dan penelitian-penelitian terdahulu.

Soekartawi (2002) menyatakan bahwa pendapatan usahatani adalah selisih antara total penerimaan dan semua biaya. Metode analisis data dapat ditulis sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan :

π = Pendapatan.

TR = Total penerimaan, dicari dengan mengalikan harga satuan (P) dengan kuantitas kopra (Q).

TC = Total biaya yang terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel.

Kebutuhan Hidup Layak selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Analisis KHL yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada:

1. Sinukaban (2007), jumlah pendapatan bersih yang harus diperoleh keluarga tani untuk dapat hidup layak minimal setara dengan 320 kg beras/tahun x 250% atau setara 800 kg beras/tahun. Nilai 250% terdiri atas kebutuhan fisik minimal dihitung 100%, kesehatan dan rekreasi 50%, pendidikan 50% dan kebutuhan sosial, asuransi dan lainnya 50% sehingga total 250%.
2. Pada penelitian ini digunakan standar perhitungan lain yang dapat dihubungkan dengan berbagai indikator garis kemiskinan (*poverty line*) berdasarkan standar Bank Dunia US\$ 1 atau US\$ 2/kapita/ hari
3. Standar yang digunakan oleh BPS sebesar US\$ 1,5/kapita/hari
4. Kebutuhan Hidup Layak di Sulawesi Barat pada Tahun 2015 sebesar Rp. 1.981.000, sehingga diketahui bahwa KHL dalam satu tahun sebesar Rp. 23.772.000/jiwa.
5. Selain itu pada penelitian ini, mengacu juga pada Upah Minimal Provinsi (UMP) di Sulawesi Barat pada Tahun 2016 sebesar Rp. 1.775.000.

Analisis kontribusi pendapatan diperoleh dengan cara membandingkan antara pendapatan total suatu usaha kopra terhadap total kebutuhan hidup layak yang menggunakan 5 metode dalam satu tahun dan dikalikan 100% yaitu dengan rumus:

Kontribusi pendapatan pola usaha kopra = $(P_i/KHL_j) \times 100\%$, dimana :

P_i = Pendapatan pola usaha kopra (i=1, 2, 3, 4, 5, dan 6)

KHL_j = Kebutuhan hidup layak dengan 6 metode (j=1, 2, 3, 4, 5 dan 6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden.

Umur Responden. Kakisina., (2013), menyatakan bahwa umur responden sangat berpengaruh terhadap kemampuan fisik, cara berfikir, dan mental dalam mengelola usahatannya terutama dalam mengambil keputusan. Jumlah responden pengusaha kopra sebanyak 31 orang yang memiliki umur bervariasi. Pada umur kisaran 26–38 terdapat 13 orang 41,95%, umur 39–51 terdapat 10 orang 33,25%, dan kisaran umur 52–65 terdapat 8 orang 23,80%. Usia produktif pengusaha kopra di Desa Polewali dengan kisaran umur 26–38 tahun mencapai 13 orang 41,95%.

Tingkat Pendidikan. Tingkat Pendidikan pengusaha kopra sangat mempengaruhi keberhasilan usaha yang dijalankannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan pengusaha, semakin mudah menerima dan menerapkan teknologi baru dalam melakukan usahanya (Patty, 2010). Tingkat pendidikan pengusaha kopra yang tertinggi pada tingkat pendidikan SMA yaitu mencapai 38,72% sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP dan SD mencapai 32,26% dan 29,04%. Tingkat pendidikan pengusaha kopra yang didukung oleh pengalaman selama bertahun-tahun serta pendidikan formal yang diperoleh melalui penyuluhan yang dilakukan dari dinas-dinas terkait memberikan keterampilan responden untuk mengelola usahatannya.

Pengalaman Berusaha Kopra. Pengalaman berusaha kopra adalah lamanya pengusaha menekuni kegiatan usahanya. Pengusaha

yang telah memiliki pengalaman kerja lebih lama akan memberikan hasil dan kemampuan kerja yang lebih baik dibandingkan yang belum berpengalaman. (Patty, 2010). Pengalaman responden dalam berusaha kopra di Desa Polewali sangat bervariasi. Pengalaman responden dalam berusaha kopra dari kisaran 1 – 11 tahun terdapat 12 orang (39,09%), 12 – 22 tahun terdapat 11 orang (35,49%), dan kisaran 23 – 35 tahun terdapat 8 orang (25,81%). Semakin lama responden berusaha kopra maka dapat mempengaruhi kebiasaan, kemahiran, dan keterampilan atau keahlian dalam melakukan kegiatan usaha yang nantinya akan mempengaruhi hasil kualitas produksi.

Jumlah Tanggungan Keluarga. Jumlah rata-rata tanggungan keluarga pengusaha kopra di Desa Polewali adalah 4 orang. Hal ini menunjukkan semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi termasuk keputusan untuk merubah kegiatan dalam usahanya. Sebaliknya semakin kecil tanggungan keluarga semakin rendah pengeluaran atau biaya sehingga makin banyak modal yang dapat dialokasikan dalam upaya peningkatan usahanya.

Analisis Pendapatan Pengusaha Kopra Di Wilayah Penelitian.

Biaya Produksi Pengusaha Kopra Di Desa Polewali. Kegiatan usaha kopra tidak terlepas dari biaya-biaya untuk mengelola usaha kopra agar memperoleh hasil yang diharapkan. Biaya produksi yang dimaksud meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel ialah biaya yang digunakan satu kali produksi dan tidak dapat digunakan untuk produksi selanjutnya, sedangkan biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi yang sifatnya dapat digunakan dalam beberapa kali produksi (Aulia., 2008)

Lebih jelasnya mengenai rincian biaya pengolahan kopra yang dikeluarkan oleh pengusaha kopra di Wilayah Penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Menunjukkan bahwa biaya variabel yang digunakan dalam

proses produksi kopra berjumlah Rp. 1.736.387, nilai biaya tersebut diperoleh dari hasil penjumlahan antara biaya tenaga kerja, dan biaya transportasi, untuk biaya tetap yang digunakan oleh pengusaha kopra diperoleh dari biaya penyusutan alat dan biaya pajak lahan usaha dengan jumlah nilai Rp. 100.301. Sehingga total biaya yang digunakan oleh pengusaha kopra dalam satu kali proses produksi sebesar Rp. 1.836.488.

Penerimaan Pengusaha Kopra Di Desa Polewali. Penerimaan adalah nilai produksi yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan merupakan hasil perkalian antara jumlah produksi dengan harga jual dari hasil produksi tersebut. Penerimaan yang diperoleh dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi yang dihasilkan dan harga jual yang sesuai (Aulia., 2008).

Lebih jelasnya mengenai rincian penerimaan yang diperoleh pengusaha kopra di Wilayah Penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Menunjukkan bahwa untuk mendapatkan hasil produksi sebanyak 1.907 Kg kopra per satu kali musim panen dibutuhkan bahan baku kelapa sebanyak 7.510 biji kelapa. Harga per Kg kopra dilokasi penelitian atau ditingkat pengusaha kopra yaitu sebesar Rp. 6.500/Kg, dengan harga Rp. 6.500/Kg dan produksi kopra sebesar 1.907 Kg, maka hasil penerimaan yang diperoleh pengusaha kopra sebesar Rp.12.398.228. Besarnya penerimaan yang diperoleh pengusaha kopra dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi yang dihasilkan dan harga jual dari produksi kopra.

Tabel 1. Biaya Produksi Pengusaha Kopra Di Wilayah Penelitian 2015

No	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Variabel	
	- Tenaga Kerja	1.165.161
	- Transportasi	571.226
2.	Total Biaya Variabel	1.736.387
3.	Biaya Tetap	
	- Penyusutan Alat	79.376
	- Biaya Pajak Usaha	20.935
4.	Total Biaya Tetap	100.301
5.	Total Biaya atau (2 + 4)	1.836.488

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2015.

Tabel 2. Penerimaan Pengusaha Kopra Di Wilayah Penelitian 2015

No	Uraian	Jumlah
1	Produksi (Kg / 7.510 Biji)	1.907
2	Harga (Rp/Kg)	
3	Penerimaan (1 x 2)	12.398.228

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2015.

Tabel 3. Pendapatan Pengusaha Kopra Di Wilayah Penelitian 2015

No	Uraian	Jumlah
1	Penerimaan (Rp)	12.398.226
2	Total Biaya (Rp)	1.836.488
3	Pendapatan / (1-2)	10.561.780

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2015.

Pendapatan Pengusaha Kopra Di Wilayah Penelitian. Pendapatan pengusaha kopra diperoleh dari hasil pengurangan antara penerimaan dan total biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh pengusaha kopra di Wilayah Penelitian dapat dilihat di Tabel 3.

Tabel 3. Menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh pengusaha kopra di Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju utara sebesar Rp. 10.561.780/musim panen. Rata-rata penerimaan petani kopra ini diperoleh per empat bulan sekali, hal tersebut dikarenakan pemanenan buah kelapa hanya bisa dilakukan sekali dalam 4 (empat) bulan. Besar pendapatan tersebut kalau dihitung per bulanya mencapai Rp. 2.640.445 per bulan, sehingga kalau di rata-ratakan dalam sejumlah anggota keluarga responden maka pendapatan rata-rata anggota keluarga pengusaha kopra sebesar Rp. 660.116,25 per bulan.

Kontribusi Pendapatan Usaha Kopra Berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak.

Kontribusi pendapatan pengusaha kopra diperoleh dari hasil perhitungan total pendapatan pengusaha kopra/bulan/jiwa. Penentuan kriteria Kebutuhan Hidup Layak ada enam metode yang digunakan yaitu berdasarkan Sinukaban 2007, Bank Dunia \$1, Bank Dunia \$2, BPS \$1,5, KHL 2015 Sulawesi Barat, dan UMP 2015 Sulawesi Barat (Rohaeni., 2013).

Tabel 4. Kontribusi Pendapatan Usaha Kopra Berdasarkan KHL Di Wilayah Penelitian 2015

Usahatani	Sinukaban	Bank Dunia US\$1	Bank Dunia US\$2	BPS US\$1,5	KHL Sulbar	UMP Sulbar
Kopra	1,04%	1,58%	0,79%	1,05%	0,33%	0,37%
Jumlah	1,04%	1,58%	0,79%	1,05%	0,33%	0,37%

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2015.

Tabel 4. Menunjukkan bahwa untuk Kontribusi pendapatan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mengacu pada masing-masing metode yang dimaksud, maka pengusaha kopra di Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara, memberikan kontribusi terhadap KHL dengan mengacu pada analisis Sinukaban, 2007 yaitu kebutuhan setara 800 kg/jiwa memberikan kontribusi kebutuhan hidup layak sebesar 1,04%. Berdasarkan standar Bank Dunia US\$1 dan US\$2/kapita/hari diperoleh kontribusi pendapatan terhadap KHL sebesar 1,58%, dan 0,79% untuk standar yang digunakan oleh BPS Nasional 2015 sebesar US\$1,5/kapita/hari memiliki kontribusi pendapatan terhadap KHL sebesar 1,05%, untuk standar kebutuhan hidup layak di Kabupaten Mamuju Utara pada Tahun 2015 sebesar Rp 1.981.000/bulan dan kontribusi pendapatan terhadap KHL sebesar 0,33%/bulan, dan untuk standar UMP Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.775.000 dengan kontribusi pendapatan terhadap KHL adalah sebesar 0,37% /bulan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan bahwa usaha kopra di Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara belum sepenuhnya memenuhi kriteria Kebutuhan hidup layak berdasarkan enam kriteria. Berdasarkan Sinukaban 2007, Bank Dunia \$1, BPS \$1,5 pendapatan anggota keluarga/jiwa sudah memenuhi standar kebutuhan hidup layak. Namun apabila dilihat dari kriteria berdasarkan Bank Dunia \$2, Kebutuhan Hidup Layak Sulawesi Barat dan Upah Minimum Provinsi, pendapatan pengusaha kopra di Desa Polewali belum memenuhi

kriteria tersebut. Tentunya hal ini belum dapat membantu meningkatkan taraf Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat khususnya di Desa Polewali yang belum mencukupi standar yang ditentukan berdasarkan kriteria masing-masing kebutuhan hidup layak sebesar 1%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendapatan yang diperoleh pengusaha kopra di Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp. 10.561.228/empat bulan apabila di rata-ratakan pendapatan pengusaha kopra adalah Rp. 2.640.445/bulan/KK, apabila dirinci kedalam pendapatan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga yang mencapai empat orang maka pendapatan masing-masing anggota keluarga mencapai Rp. 660.116,25/jiwa/bulan.

Besarnya usaha kopra di Desa Polewali belum sepenuhnya memenuhi kriteria Kebutuhan hidup layak berdasarkan enam kriteria. Berdasarkan Sinukaban 2007, Bank Dunia \$1, BPS \$1,5 pendapatan anggota keluarga/jiwa sudah memenuhi standar kebutuhan hidup layak. Namun apabila dilihat dari kriteria berdasarkan Bank Dunia \$2, Kebutuhan Hidup Layak Sulawesi Barat dan Upah Minimum Provinsi pendapatan pengusaha kopra di Desa Polewali belum memenuhi kriteria tersebut, karena tidak mencapai nilai standar Kebutuhan Hidup Layak sebesar 1%.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Polewali Kecamatan

Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara, diharapkan kepada pelaku usaha kopra untuk lebih meningkatkan hasil produksi kopra agar dapat memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak yang telah ditentukan oleh pemerintah Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia. A. N., 2008. *Analisis Pendapatan Usahatani Padi dan Kelayakan Usahatani Vanili pada Ketinggian Lahan 350-800 M Dpl Di Kabupaten Tasikmalaya*. Skripsi.
- Biro Pusat Statistik. 2009. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*. Katalog. BPS.
- Kakisna O. S. 2013,. dkk. *Keterlekatan Perilaku Ekonomi dalam Hubungan Sosial: Kasus Jaringan Pemasaran Sopi Di Negeri Mesa Kecamatan Teon Nila Serua (Tns) Kabupaten Maluku Tengah*. J. Agrilan Vol. 1 No. 4. Oktober 2013.
- Luntungan. H.T., Effendi. D, Supriadi. H. dan Damanik, S. 2005. *Laporan Kegiatan Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Di Riau*. Perspektif. Vol. 6 No. 2 / Desember 2007. Hal 94–104.
- Patty. Z ., 2010. *Karakteristik Petani Kelapa dan Produksi Kopra Rakyat Di Kabupaten Halmahera Utara*. J. Agroforestri. Vol 5 No. 4 Desember 2010. Hal. 335–344.
- Riduwan., 2005. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula, Bandung : Alfabeta*. www.konsistensi.com. Diakses pada Tanggal 11 oktober 2015.
- Rohaeni. E.S., 2013. *Analisis Usahatani Berbasis Padi dan Ternak Sapi serta Kontribusi Pendapatan terhadap Kebutuhan Hidup Layak Di Lahan Kering*. J. Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian. Hal 564-574.
- Sinukaban. N., 2007. *Dinamika Kualitas Tanah, Erosi, dan Pendapatan Petani Akibat Alih Guna Lahan Hutan Menjadi Lahan Kakao Di DAS Nopu Sulawesi Tengah*. Vol. 31 No.3. Juli 2007.
- Soekartawi, 2002. Usahatani. <http://lindasetia924.wordpress.com/2012/10/16/usahatani>. Diakses pada Tanggal 5 Juli 2015.
- Wardani, D.K.K., 2012. *Proses Penetapan Upah Minimum Kabupaten, Di Kabupaten Purbalingga*. Hal. 1–102.
- Yacoub, Y., 2012. *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat*. Vol 8 No 3. Hal 176-185.